

**1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan di tingkat perangkat daerah terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi perangkat daerah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan perangkat daerah, acuan dalam pembuatan rencana kerja, menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, serta untuk mempertajam

arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung periode 2018-2023. Kabupaten Belitung sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Hal tersebut selanjutnya diamanatkan untuk daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Daerah (RPD) periode tahun 2024-2026.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk guna melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi Lainnya di Kabupaten Belitung melaksanakan penyusunan Renstra tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026.

Renstra perangkat daerah harus memiliki keterkaitan dengan RPD 2024-2026. Renstra disusun berpedoman pada RPD sesuai tugas dan

fungsi PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi dan Nasional.

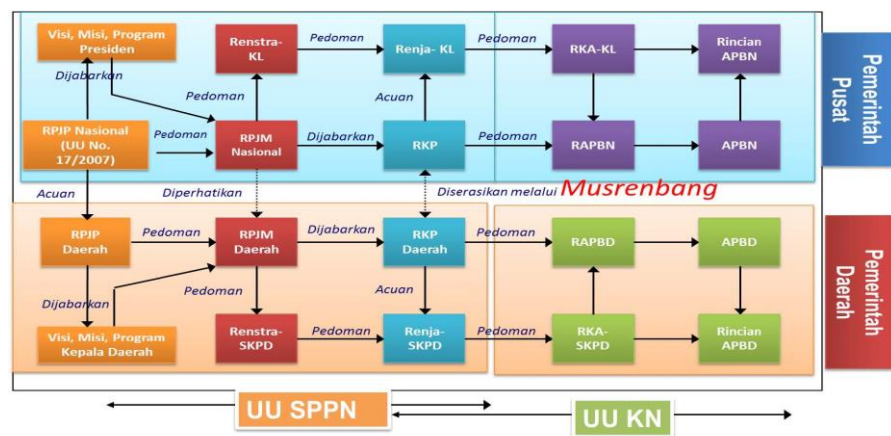
Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk guna melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang lainnya di Kabupaten Belitung melaksanakan penyusunan Renstra tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, maka Renstra Kecamatan Sijuk disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2024-2026.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD. Dalam hal ini Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung disusun untuk digunakan pada masa transisi perencanaan selama 3 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1



Rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD yang memuat Program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sijuk.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan atau Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung 2024- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenkelatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung 2024-2026 adalah untuk memberikan arahan dan pedoman perangkat daerah serta seluruh aparatur dalam melaksanakan tugasnya dengan membangun komitmen Bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam menentukan prioritas dibidang perencanaan sehingga tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah:

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan Sijuk dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sijuk.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabuapten Belitung, telaahan renstra Kementrian/Lembaga dan renstra perangkat daerah provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang dan Penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Sijuk.

### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bab ini memuat strategi dan kebijakan pembangunan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam bab ini memuat rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung periode 2024- 2026.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

## **BAB VIII PENUTUP**

Dalam bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.



Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang urusan Pemerintahan diibidang Pelayanan kepada Masyarakat dan mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- d. penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- e. penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, Aparatur Sipil Negara, rumah tangga, keuangan dan aset;
- f. penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung mempunyai Sumber Daya Manusia sebanyak 17 Orang, yang mempunyai latar belakang Pendidikan S1, D3, dan SMA dan sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan peralatan Kantor serta perlengkapannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Sijuk dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan Pelayanan kepada Masyarakat dan ketersediaan sarana dan Prasarana pendukung seperti : dibangunnya Kantor Kecamatan Sijuk 2 (dua) Tingkat, pada tahun 2015.

Dalam Pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023 terdapat Hambatan Utama Yaitu :

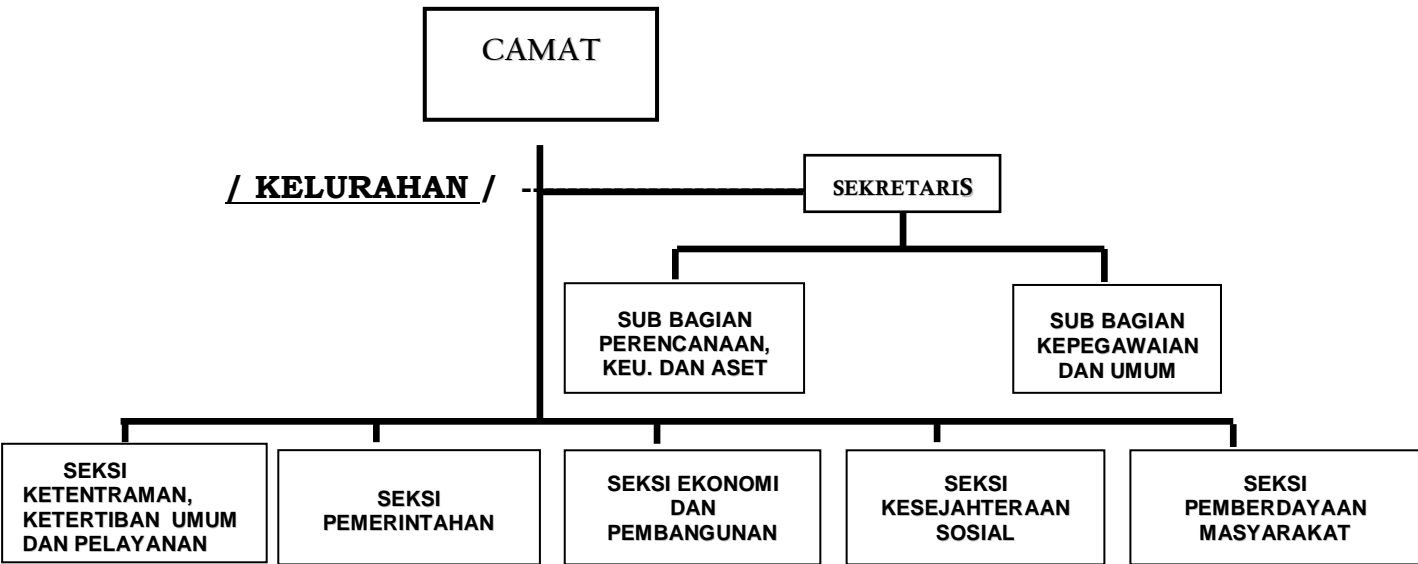
1. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.
2. Belum memadai Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Keterbatasan Pagu Anggaran.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Sijuk diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Bagan 2.1.1  
Struktur Organisasi  
Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta  
Tata Kerja Kecamatan.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Badau diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Belitung Nomor 63 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas dan Fungsi dibawah Camat adalah sebagai berikut :

### **1. Camat**

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Bab III Tugas dan Fungsi Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengoordinasikan upaya dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diulakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai berikut:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelimpahan kewewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati **Pasal 6** disebutkan ;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

Sebagai Berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai lingkup tugasnya ;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- d. Penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di kecamatan ;
- e. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, Aparatur Sipil Negara, rumah tangga, Keuangan dan Aset ;
- f. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan ; dan
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

***Adapun Penjabaran Tugas dan Fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Kabupaten Belitung sebagai berikut :***

## **2. Sekretaris**

Tugas : Membantu Camat dalam memberikan pelayanan Administratif dan Tekhnis pada semua unsur dilingkungan Kecamatan.

Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan ;  
b. Penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan kecamatan ;  
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset ;  
d. Pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara ;  
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya ; dan  
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **3. Seksi Ketentraman, Ketertiban umum dan Pelayanan**

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman,ketertiban umum dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran urusan Ketentraman Ketertiban umum dan pelayanan;  
b. Penyiapan Bahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta aparat satuan tugas perlindungan masyarakat ;  
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi sosial politik dan kemasyarakatan lainnya ;  
d. Penyiapan bahan penyusunan standar operasional

- prosedur pelayanan dan standar pelayanan ;
- e. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan ;
  - f. Pelaksanaan pemberian layanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati ;
  - g. Penyiapan bahan penetapan pelaksanaan teknis urusan pelayanan ;
  - h. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan ;
  - i. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman ketertiban umum dan pelayanan ;
  - j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya ;
  - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya ; dan
  - l. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Seksi Pemerintahan.**

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan ;

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program di bidang Pemerintahan ;

b. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan keagrariaan :

c. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil ;

d. Penyiapan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi desa / kelurahan ;

e. Penyelenggaraan pengawasan umum terhadap pelaksanaan APBDesa ;

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan ;

g. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan

terkait bidang tugasnya ; dan

- i. Pelaksanaan tugas – tugas lain yg diberikan oleh atasan.

## **5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana prasarana fisik, perekonomian dan produksi diwilayah Kecamatan ;  
b. penyiapan bahan penyusunan program perencanaan pembangunan ;  
c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan ;  
d. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya ;  
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya ; dan  
f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan social, pendidikan, kepemudaan, olahraga dan keagamaan ;

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan bantuan social, kepemudaan dan olahraga ;  
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan dan pendidikan ;  
c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- urusan kesejahteraan sosial ;
- d. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya ;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya ; dan
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yg diberikan oleh atasan.

## **7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan masyarakat ;

Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup ;

b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat ;

c. Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan masyarakat ;

d. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya ;

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya ; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2.2 SUMBER DAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

### **2.2.1 Sumber Daya Aparatur**

#### **a. Sumber Daya Aparatur**

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Sijuk Pada Desember 2022, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 17 Pegawai, yang terdiri dari 13 Orang Pegawai Laki-laki (



76,47 %) dan 4 Orang Pegawai Perempuan ( 22,52 % ). Berdasarkan Jenjang Pendidikan, untuk ASN Kecamatan Sijuk didominasi oleh Lulusan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi yaitu Lulusan S1, D3, Dengan Jumlah total sebanyak 8 Orang (47,06%). Sisanya berupa Lulusan SMA sebanyak 9 Orang (52,94%) Jumlah dan Komposisi Pegawai pada Kecamatan Sijuk Tahun 2022 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

**Tabel 2.1**

Alokasi Pegawai Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Tahun 2022.

No	Unit Kerja	Jumlah		Ket
		Lk	Pr	
1.	Camat	1	-	
2.	Sekretaris	1	-	
	1. Subbag Kepegawaian dan Umum	-	1	
	2. Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	1	-	
	3. Fungsional Umum	1	2	
	4. Non ASN	2	-	
3.	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan	1	-	
	1. Fungsional Umum	1	-	
4.	Kasi Pemerintahan	-	1	
	1. Fungsional Umum	3	-	
	2. Non ASN	-	1	
5.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	-	-	Belum ada
	1. Fungsional Umum	1		
	2. Non ASN	1		
6.	Kasi Kesejahteraan Sosial	-	-	Belum ada
	1. Fungsional Umum	2	-	
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	
	1. Fungsional Umum	-	-	
	2. Non ASN		1	
Jumlah		16	6	

**Tabel 2.2**

Jumlah SDM Kecamatan Sijuk Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun  
2022

Rincian	Jumlah PNS		Jumlah CPNS		Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Golongan IV	2	-	-	-	2
Golongan III	9	2	-	-	11
Golongan II	2	2	-	-	4
Golongan I	-	-	-	-	0
Jumlah			-	-	17

**Tabel 2.3**

Jumlah SDM Kecamatan Sijuk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun  
2022

No.	Rincian	Jumlah PNS		Jumlah CPNS		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	S-2	-	-	-	-	-
2	S-1	4	1	-	-	5
3	D-IV	1	1	-	-	2
4	D-III	1		-	-	1
5	D-II	-	-	-	-	-
6	D-1	-	-	-	-	-
7	SLTA	7	2	-	-	9
8	SLTP	-	-	-	-	-
9	SD	-	-	-	-	-
Jumlah		13	4	-	-	17

Tabel 2.4

Jumlah SDM Kecamatan Sijuk Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Tahun 2022

GOL PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir							
	S1		D IV		DIII		SMA	
	L	P	L	P	L	P	L	P
PNS Gol. IV	1		1					
PNS Gol. III	3			1	1		5	1
PNS Gol. II		1					2	1
PNS Gol. I								
CPNS Gol. IV								
CPNS Gol. III								
CPNS Gol. II								
CPNS Gol. I								
Jumlah	4	1	1	1	1		7	2

Tabel 2.5

Jumlah SDM Kecamatan Sijuk Tahun 2022 Yang Telah Mengikuti Diklat

NO	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai		Telah Mengikuti Dan Lulus	Yang Belum Mengikuti
		L	P		
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II				
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1		1	1
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2	2	4	3
4	Diklat Fungsional				
5	Diklat Barang dan Jasa	2	1	3	5

2.2.2 Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung Operasional dan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk,Sarana dan Prasarana aparatur yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk berupa Sarana Transportasi, Sarana Telekomunikasi, serta Peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung**  
**Sampai dengan 2022**

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah Yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Ket
1	Bangunan Gedung Ktr. Cmt	M2	1	1	Cukup	B			
2	Bangunan Gedung Rapat	M2	1	1	Cukup			RB	
3	Station Wagon(Mobil Kijang)	Buah	1	1	Cukup			RB	
4	Station Wagon Mobil Avanza	Buah	1	1	Cukup	B			
5	Station Wagon(Mobil Truck)	Buah	1	1	Cukup	B			
6	Motor Dinas Pegawai	Buah	9	11	Kurang	2 B	4 RR	3 RB	
7	Meja Rapat	Buah	4	8	Kurang		RR		
8	Kursi Rapat (Plastik / Lipat)	Buah	100	200	Kurang		RR		
9	Kursi Putar (Kursi Kerja)	Buah	15	20	Kurang		RR		
10	Sound System	Set	1	1	Cukup		RR		
11	Mimbar / Podium	Buah	1	1	Cukup			RB	
12	Bangunan Tempat Ibadah	Buah	1	1	Cukup	B			
13	Tempat Parkir Mobil/Motor	Buah	1	2	Kurang		RR		
14	Ginset	Buah	1	1	Cukup	B			

15	Hordeng Kantor	75 M	75	75	Cukup	B			
16	Kipas Angin	Buah	3	3	Cukup		RR		
17	AC Split	Buah	16	16	Cukup		RR		
18	Stationary WaterPump(M.air)	Buah	1	2	Kurang		RR		
19	Mesin Rumput	Buah	2	2	Cukup		RR		
20	Komputer PC	Set	7	10	Kurang	B			
21	Lap Top	Buah	12	12	Cukup	10 B		2 RB	
22	Meja ½ Biro (Meja Kerja)	Buah	15	20	Kurang	B			
23	Meja Pimpong	Buah	1	1	Cukup			B	
24	Filing Kayu	Set	10	15	Kurang			B	
25	Filing Kabinet Besi	Set	10	15	Kurang	B			
26	Lemari Arsip	Set	10	15	Kurang	B			
27	Lemari Kaca Arsip Piala	Set	0	2	Kurang	B			
28	TV LED Ruang Tunggu Pelayanan	Set	1	1	Cukup	B			
29	Kursi Sofa (TAMU )	Set	2	3	Kurang	B			
30	Grasi Mobil Truck	Set	1	1	Cukup	B			
31	Tempat Penampung Air	Buah	2	2	Cukup	B			
32	Printer PC	Set	6	10	Kurang	3 B	3 RB		
33	Keyboard	Set	6	10	Kurang		RB		
34	Lambang Burung Garuda	Buah	1	1	Cukup	B			
35	Meja ½ Biro Pelayanan	Buah	1	1	Cukup	B			
36	Kursi Gandeng R. Tunggu	Buah	5	10	Kurang	B			
37	Mesin Absensi Sidik Jari	Buah	1	1	Cukup	B			
38	Jam Dinding	Buah	5	10	Kurang	B			
39	Meja Komputer	Set	6	10	Kurang	B			
40	Parabola	Set	1	2	Kurang	B			

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Tahun 2019-2022 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk dibidang Pelayanan Publik/ Masyarakat beserta Target Indikator kinerjanya,

Dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Berdasarkan Indeks Kinerja Utama Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke (%)					Rasio Pencapaian tahun ke (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Survei Kepuasan Masyarakat				80	85				83,82	87,32				104%	103%			
2.	Persentase peningkatan prestasi Kecamatan				2,5 %	2,5 %				2,5%	2,5%				100%	100%			
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)						3,48	3,50	3,75			3,49	3,145	n/a			100,2	89,86	n/a
4.	Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan/ Desa						0,1%	80%	85%			100%	100%	n/a			88	125	n/a
5.	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat hasil Musrenbangcam dapat disetujui di Tingkat Kabupaten						3%	4%	5%			8,1%	100%	n/a			270	2.500	n/a
6.	Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku						80%	80%	85%			100%	100%	n/a			100	125	n/a
1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan						100	100	100			100%	100%	n/a			100	100	n/a
2	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah						75	75	75			100%	100%	n/a			133,3	133,3	n/a
3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah						100	100	100			100%	100%	n/a			100	100	n/a
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100	100	100			100%	100%	n/a			100	100	n/a
5	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						100	100	100			100%	100%	n/a			100	100	n/a
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						100	100	100			100%	100%	n/a			100	100	n/a
7	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi						100	100	100			100%	100%	n/a			100	100	n/a

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2019-2023					Realisasi Anggaran 2019-2023					Rasio antara realiasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Realisasi
1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan			36.787.650	3.000.000	3.000.000			35.026.500	3.000.000	n/a			95,21	100%	n/a		
2	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah			2.500.491.000	2.431.915.741	2.550.700.000			2.293.901.363	2.353.275.538	n/a			91,74	96,76	n/a		
3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah			403.443.250	398.125.850	340.446.600			366.031.465	377.490.513	n/a			90,73	94,81	n/a		
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			106.601.280	98.901.400	51.790.000			74.212.300	89.249.400	n/a			69,62	90,24	n/a		
5	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			100.908.060	45.993.900	65.013.500			85.386.850	45.129.700	n/a			84,62	98,12	n/a		
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			66.957.500	212.338.650	91.128.750			63.751.000	208.121500	n/a			95,21	98,01	n/a		
7	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi			47.082.750	55.395.950	28.800.000			42.258.000	49.813.850	n/a			89,75	89,92	n/a		



Dari penjelasan Tabel 2.3.1 diatas pernyataan kinerja Tahun 2021 dan realisasi kinerja pada Tahun 2021, pencapaian yang didapatkan antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

- Pencapaian indikator Nilai Survei Kepuasan masyarakat pada Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh Bagian Organisasi Pemda Kabupaten Belitung Tahun 2022 yaitu nilai SKM 3,145 dari target sebesar 3,50 dengan nilai konversi SKM sebesar 78,63 jika dibandingkan dengan nilai konversi SKM pada tahun 2021 sebesar 86,65 maka terjadi penurunan nilai konversi SKM sebesar 8,02 poin. Hal tersebut di karenakan kecamatan Sijuk keterlambatan dalam menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat ke Bagian Organisasi Kabupaten Belitung.
- Indikator persentase ketercapaian kegiatan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan Sijuk pada tahun 2021 sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan dapat terlaksananya seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sijuk Tahun 2021.
- Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dengan indikator Persentase (%) usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil dari musrenbangcam yang dapat disetujui di tingkat kabupaten pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 4%. Hal ini merupakan hasil dari koordinasi yang baik dari pihak Kecamatan dengan pemerintahan desa dalam menentukan usulan pembangunan yang dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap.
- Pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator persentase desa yang beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2022, hal ini dicapai dikarenakan hasil dari koordinasi, evaluasi, pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan kepada pemerintahan desa dalam penyusunan RPJMDes, RKPDDes dan RAPBDes yang baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan tepat waktu oleh pemerintah desa di Kecamatan Membalong. Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam

dokumen perencanaan selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Belitung. Besaran anggaran diperkirakan antara 0,75 % - 0,95 % dari total APBD Kabupaten Belitung. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sijuk dijelaskan pada Tabel 2.3.2 .

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2022 sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase rasio sudah di atas 81 %.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Salah satu isu strategis yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan visi Renstra Kementerian Dalam Negeri dan telaahan RTRW dan KLHS adalah Terwujudnya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif, pelayanan publik yang optimal **di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air, dan mewujudkan penyelenggaran pemerintahan daerah *good goverment, clean goverment* melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut adalah Kecamatan Sijuk berusaha mewujudkan** pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif yang dimulai dari pemerintahan Desa yang ada di lingkup Kecamatan Sijuk.

Tantangan dan peluang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dalam mewujudkan hal di atas guna mendukung Visi Renstra Kementerian Dalam Negeri dan sesuai dengan analisa Telaahan RTRW dan KLHS, antara lain :

- 1) Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang Kecamatan Sijuk untuk meningkatkan kinerja yang dimulai dari lingkup Desa ;

- 1) Belum optimalnya pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Camat dalam hal perizinan;
- 2) Belum memadai sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

Salah satu isu strategis yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan pengembangan pelayanan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah isu **Kecamatan Sijuk Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang**. Dari luas wilayah, yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain adalah

#### **Sektor Pariwisata, Perikanan Kelautan dan Pertanian.**

##### **a. Sektor Pariwisata.**

Kecamatan Sijuk yang terletak dipesisir Utara Pulau Belitung memiliki pantai yang indah sehingga sangat memungkinkan dikembangkan wisata bahari yang didukung oleh sektor lainnya.

Potensi pantai yang ada meliputi Tanjung Kelayang, Tanjung Binga, Tanjung Tinggi dan pantai-pantai disekitarnya, Pendaunan, Penyairan, Sengkelik Sijuk dan Batu Bedil Sungai Padang serta tempat lain yang belum tergali. Salah satu promosi yang dilakukan adalah Buang Jong Tanjung kelayang dan Buang Jong Tanjong Tinggi, kegiatan Sail Indonesia dan pekan Wisata kecamatan Sijuk pada bulan Oktober setiap Tahunnya.

Potensi wisata lainnya meliputi wisata Sejarah yaitu Masjid Al Ikhlas Sijuk yang berdiri tahun 1817 yang saat ini masih bertahan keasliannya dan Klenteng Sijuk yang dibangun pada tahun 1814.

Juga wisata alam pemandian umum di Air Seruk , Bukit Paramon Desa Air Selumar sebagai tempat Kemah Wisata, dll.

**b. Perikanan dan Kelautan** merupakan aset besar yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan serta sub sector kelautannya sendiri. Posisi Kecamatan Sijuk sebagai daerah pesisir sangat perlu dikembangkan dan dijaga kelestariannya dalam kelangsungan hidup manusia dengan mempertimbangkan secara masak terhadap kebijakan yang akan diambil selain potensi ikan disepanjang pesisir Kecamatan Sijuk.

Pengembangan potensi juga perlu didukung dengan sumberdaya manusianya (nelayan) dengan pemberian bantuan sarana kerja, alat tangkap, sarana tangkap, pelatihan manajemen, pengolahan, serta sarana pendukung lainnya misalnya tambat labuh dan dermaga.

#### **c. Pertanian.**

Pertanian di Kecamatan Sijuk juga memiliki potensi yang bagus, baik pertaniannya, perkebunan dan peternakan. Pertanian yang mulai diminati masyarakat dalam arti dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik meliputi, sayur mayur, lada, karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, sengon, jati dsb. Demikian juga peternakan seperti ayam, sapi dsb.

#### **d. Pertambangan.**

Potensi Pertambangan di Kecamatan Sijuk cukup tinggi yang meliputi tambang kaolin, timah dll. Namun dalam pengelolaannya perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam dan pengaturan dengan ketentuan perundangan yang lebih tegas dan tidak merugikan pihak atau kepentingan lain.

Beberapa potensi tersebut diatas juga harus didukung dengan potensi lain seperti sarana perhubungan, telekomunikasi dan lain-lain.

Selanjutnya, Reformasi birokrasi menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan, tuntutan dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan yang berkembang secara dinamis ini secara berkualitas.

Reformasi birokrasi di Indonesia secara terlembaga pada dasarnya telah diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang menggambarkan bahwa pelaksanaan program pembangunan aparatur negara masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Permasalahan tersebut antara lain masih terjadinya praktik-praktik KKN dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas. Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, pembangunan aparatur negara diarahkan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur

negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Reformasi birokrasi sebagai bagian dari pembangunan nasional pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan nasional Indonesia, yaitu “**INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**”. Dalam kaitan tersebut, visi reformasi birokrasi Indonesia adalah “*Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia*”. Makna visi tersebut adalah terwujudnya pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Tantangan dan peluang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah terkait langsung dengan salah satu program dari 11 (Sebelas) program tingkat mikro reformasi birokrasi yaitu *Program Pembinaan Perangkat Daerah* dalam pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Perangkat Desa. Tantangan dan masalah dalam

Mewujudkan pelayanan publik yang prima dapat dikatakan sangat kompleks, mulai dari intelektual SDM Perangkat desa, penilaian kinerja perangkat desa, terbatasnya dana, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan dalam program ini yang diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan.

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Sijuk pada Bab II, maka berikut adalah pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
01.	Belum optimalnya tatakelola pelayanan publik	Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dalam Pemenuhan Pelayanan Publik	1. Masih Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM Kecamatan. 2. Belum Memadai Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa.	1. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang social, keagamaan, olahraga, kesehatan, keamanan dan ketertiban . 2. Kurang aktifnya Lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk. 3. Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi Masyarakat dengan kecamatan.
		Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah Desa	1. Masih rendahnya kapasitas aparatur perangkat Desa.

### 3.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Belitung periode 2018-2023. Kabupaten Belitung salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2023 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Kabupaten Belitung.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi Daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka disusunlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.

Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 dengan **tujuan RPD yaitu “Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”** dengan **sasaran RPD yaitu “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel”** melalui strategi **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”** dan **arah kebijakan peningkatan tata kelola pelayanan publik.**

Terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026 yaitu:

a. Faktor Penghambat

1. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan;
2. Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

b. Faktor Pendorong

- 1) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
- 2) Banyaknya kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROPINSI.**

#### **7.3.1 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga**

Renstra Kecamatan Sijuk mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2021- 2026 antara lain adalah :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
5. Meningkatnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan



9. Meningkatnya penddayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional
10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme apatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri
11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintahan Dalam Negeri
12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

Berdasarkan sasaran Kementerian/Lembaga diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran no 4).

**Faktor-faktor yang menghambat pelayanan pada Kecamatan Sijuk ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L:**

1. **Belum efektifnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan Kecamatan-Desa**
2. **Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif baik di Kecamatan maupun di Desa.**

**Sedangkan Faktor-faktor Pendorong peningkatan pelayanan pada Kecamatan Sijuk ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L:**

1. **Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan dan desa.**
2. **Banyaknya kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.**

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034, yang bertujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sector unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan dan pariwisata serta

sector penunjang lainnya”. Kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Belitung, antara lain :

- a. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten;
- b. Pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten;
- d. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Pengembangan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- f. Penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten.

Perangkat Daerah harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Indikator yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup tersebut antara lain:

- a. Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan beresiko tinggi.
- b. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
- c. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
- d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
- e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
- f. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
- g. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
- h. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
- i. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
- j. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah inndustri.
- k. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
- l. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

- m. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
- n. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :

#### Faktor Penghambat

- 1. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup
- 2. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah
- 3. Masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian SDGs

#### Faktor Pendukung

- 1. Adanya komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS
- 2. Secara tata ruang wilayah kecamatan Sijuk merupakan daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIJUK

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung pada tahun 2024 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Belitung.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

**Salah satu isu strategis yang sangat penting** dan berkaitan langsung dengan pengembangan pelayanan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah :

**1. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Belum Optimal.**

Hingga saat ini Kecamatan Sijuk masih melaksanakan Standar Pelayanan yang belum megarah ke Pelayanan PATEN. Data Survey Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2022 Nilainya 87,32, sedangkan tahun 2021 Nilainya : (90,41 dan tahun 2020 Nilainya : (91,37).

Melaksanakan dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat Sesuai Prosedur dan Persyaratan dalam bentuk Standar Operasional (SOP).

**2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mandiri hingga masyarakat dapat membentuk kelompok yang produktif dan dapat mendukung perekonomian masyarakat dan Desa sehingga tidak tergantung lagi dengan bantuan Pemerintah. Serta memacu masyarakat Desa untuk berpikir dan bertindak kreatif seperti menciptakan Teknologi Tepat Guna yang bermanfaat dan dapat bernilai ekonomis.

**3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.**

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga usulan prioritas Pembangunan dari Desa dapat dibahas di forum Musrenbang

Kecamatan sehingga usulan masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui ditingkat Kabupaten dan Propinsi.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan tujuannya adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran digambarkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Sijuk Tahun 2024 – 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatny a tata kelola pelayanan publik Kecamatan	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  Sumber data : Laporan SKM dari Bag. Organisasi Setda	3.50	3.55	3.60
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa  Rumusan : Jumlah                    Jenis Pemberdayaan	85%	90%	90%

			<p>masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berkenaan / Jumlah Jenis Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan X 100%</p> <p>Ket. Jenis bagi untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan</li> <li>2. Perlombaan</li> <li>3. Pelatihan</li> <li>4. Promosi</li> <li>5. Festival</li> <li>6. Sosialisasi</li> <li>7. Even Keagamaan</li> <li>8. Forum</li> </ol>			
		<p>Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Desa</p>	<p>Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>Rumusan :</p> <p>(Jumlah Desa beradministrasi Baik / Jumlah Desa dalam lingkup Kecamatan) x 100 %</p> <p>Keterangan :</p> <p>Desa yang beradministrasi baik adalah Desa yang menyusun APBDes (induk dan perubahan), RKP Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang menjadi Kewenangan Kecamatan.</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>

## **4.2 CASCADING KINERJA KECAMATAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 - 2026**

Adapun Cascading Kinerja Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut.



<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
--------------	------------------------------------

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan Program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sijuk Tahun 2024 – 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Sijuk, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sijuk, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada Bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kecamatan Sijuk Tahun 2024-2026, Yaitu “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah ”

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan Sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kec. Sijuk**

Tujuan RPD	Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan				
Sasaran RPD	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan kinerja pelayanan di kecamatan	1. Meningkatkan kompetensi SDM Kecamatan 2. Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa	peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang social, keagamaan, olahraga, kesehatan, keamanan dan ketertiban, dll 2. meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk 3. meningkatkan koordinasi antara lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan

		Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku	Peningkatan Jumlah Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku	1.Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa
--	--	--	--	--	--

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tahun 2024–2026 yang disertai dengan indikator capaian yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Berikut rencana program dan kegiatan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026:

**A. Sekretariat**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.

Definisi operasional:  $(\text{Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan} / \text{jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan}) \times 100\%$  dengan kegiatannya sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikatornya adalah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kegiatannya adalah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah.

2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

Definisi operasional: sesuai perhitungan rumusan Peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Indeks profesionalitas ASN sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN dengan kegiatannya sebagai berikut:

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikatornya adalah Kinerja Aparatur yang baik.
3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

Definisi operasional: Rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indicator kegiatan adalah terpenuhunya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikatornya adalah pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.

4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Definisi operasional: Rata-rata capaian pemenuhan sarana prasarana aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikatornya adalah Jenis barang milik daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikatornya adalah Barang milik daerah dalam kondisi baik.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator program yaitu: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Definisi operasional: (Jumlah pemberdayaan masyarakat yang diikuti / jumlah pemberdayaan masyarakat yang ada) x 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikatornya adalah Laporan Hasil Pemberdayaan Desa.

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator program yaitu: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Definisi operasional: (Jumlah hasil koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan yang dilaksanakan/ Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan ) x 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan indikatornya adalah Laporan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah.

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator program yaitu: Persentase desa dan atau Kelurahan taat administrasi.

Definisi operasional:  $(\text{Jumlah Desa dan/atau Kelurahan taat administrasi} / \text{Jumlah Desa dan/atau Kelurahan}) \times 100\%$  dengan kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan indikatornya adalah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sijuk.

Secara harfiah, definisi dari program adalah penjabaran kebijakan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2024-2026, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung menetapkan 4 (Empat) Program dan 11 (sebelas) kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategic* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta misi dan visi pemerintah daerah.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada awalnya mengalami penyesuaian yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan sebagai pedoman operasional kegiatan selanjutnya. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Sijuk dapat dilihat pada tabel 6.1 terlampir.

Tabel 6.1																							
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan																							
TAHUN 2024-2026																							
Tujuan		Sasaran		Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Pejabat yang bertanggung jawab		Lokasi			
												2024		2025		2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1.1.	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	1.1.1.	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dalam pemenuhan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		3,50%		3,55%		3,60%		3,60%						Kecamatan Sijuk	Sijuk			
	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan	7	01	01	1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah 4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100%	4.499.500.000	100%	5.128.700.000	100%	4.659.500.000	100%	14.287.700.000				Kecamatan Sijuk	Sijuk			
		7	01	01	2.01	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen Hasil perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	11 Dok	11 Dok	11 Dok	33 Dok										
						Hasil		Terpeenuhnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai Peraturan	-	100%	100%	100%	100%										
		7	01	01	2.01	01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3 Dok	3.000.000	3 Dok	3.000.000	3 Dok	3.000.000	9 Dok	3.000.000					
		7	01	01	2.01	02	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1Dok	1.500.000	1Dok	1.500.000	1Dok	1.500.000	3 Dok	4.500.000	Kecamatan Sijuk	Sijuk			
		7	01	01	2.01	03	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil	-	1Dok	1.500.000	1Dok	1.500.000	1Dok	1.500.000	3 Dok	4.500.000					



				7	01	01	2.01	04	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1Dok	1500.000	1Dok	1500.000	1Dok	1500.000	3 Dok	4.500.000		
				7	01	01	2.01	05	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1Dok	1500.000	1Dok	1500.000	1Dok	1500.000	3Dok	4.500.000		
				7	01	01	2.01	06	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1Laporan	1500.000	1Laporan	1500.000	1Laporan	1500.000	3 Laporan	4.500.000		
				7	01	01	2.01	07	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3 Laporan	3.000.000	3 Laporan	3.000.000	3 Laporan	3.000.000	9 Laporan	9.000.000		
				7	01	01	2.02		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen keuangan Perangkat Daerah	-	4 Dok		4 Dok		4 Dok		12 Dok			
									Hasil		Terpekaanya Dokumen Keuangan sesuai Peraturan	-	100%	3.004.500.000	100%	3.204.500.000	100%	3.304.500.000	100%	3.513.500.000		
				7	01	01	2.02	01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	21 Orang / Bulan	3.000.000.000	21 Orang / Bulan	3.200.000.000	21 Orang / Bulan	3.300.000.000	63 Orang/ bulan	3.500.000.000		
				7	01	01	2.02	05	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1laporan	1500.000	1laporan	1500.000	1laporan	1500.000	3 laporan	4.500.000		
				7	01	02	2.02	08	3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	2 Dok	3.000.000	2 Dok	3.000.000	2 Dok	3.000.000	6 Dok	3.000.000		
				7	01	02	2.05		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	Terpekaanya Administrasi Pegawai	-	31 Orang		31 Orang		31 Orang		93 Orang			
									Hasil		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100%	109.500.000	100%	109.500.000	100%	109.500.000	100%	328.500.000		
				7	01	02	2.05	02	1. Pengadaan Paksiun Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	Jumlah Paket Paksiun Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1Paket	19.500.000	1Paket	19.500.000	1Paket	19.500.000	105 Stel	58.500.000		
				7	01	02	2.05	09	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	6 Orang	30.000.000	6 Orang	30.000.000	6 Orang	30.000.000	18 Orang	270.000.000		
				7	01	02	2.06		4. Kegiatan Administrasi Umum Peraangkat Daerah	Keluaran	Terpekaanya Administrasi Umum Peraangkat Daerah.	-	20 Paket		20 Paket		20 Paket		100 Paket			
									Hasil		Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Peraangkat Daerah	-	100%	379.000.000	100%	347.500.000	100%	351.000.000	100%	1.077.500.000		
				7	01	02	2.06	01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	1Paket	20.000.000	1Paket	17.500.000	1Paket	20.000.000	3 Paket	57.500.000		
				7	01	02	2.06	02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	2 Paket	60.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	6 Paket	160.000.000		
				7	01	02	2.06	03	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	1Paket	8.000.000	1Paket	3.000.000	1Paket	10.000.000	3 Paket	27.000.000		

					7	01	02	2.06	04	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	2 Paket	140.000.000	2 Paket	120.000.000	2 Paket	120.000.000	6 Paket	380.000.000		
					7	01	02	2.06	05	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	1Paket	20.000.000	1Paket	20.000.000	1Paket	20.000.000	3 Paket	60.000.000		
					7	01	02	2.06	06	6. Penyediaan Bahan Baccan dan Peraturan Perundangan	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Baccan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	-	1Dok	6.000.000	1Dok	6.000.000	1Dok	6.000.000	3 Dok	18.000.000		
					7	01	02	2.06	09	7. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	125.000.000	36 Laporan	375.000.000		
					7	01	02	2.07		5. Kegiatan Pengadaa Barang Milik Daerah Pemangaj Uresan Pemerintah Daerah	Keluaran	Jenis Barang Milik Daerah	-	45 Unit		60 Unit	10 Unit		115 Unit				
										Hasil	Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Anasatara	-	100%	579.000.000	100%	684.700.000	100%	337.000.000	100%	1.600.700.000			
					7	01	02	2.07	01	1. Pengadaa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	3 Unit	150.000.000	1 Unit	600.000.000	3 Unit	150.000.000	7 unit	900.000.000	Kecamata a Sijuk	Sijuk
					7	01	02	2.07	05	2. Pengadaa Mebel	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	32 Unit	73.000.000	50 Unit	30.000.000	2 Unit	20.000.000	84 unit	123.000.000		
					7	01	02	2.07	06	3. Pengadaa Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	7 Unit	36.000.000	9 Unit	54.700.000	4 Unit	162.000.000	20 Unit	252.700.000		
					7	01	02	2.07	09	4. Pengadaa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	1 Unit	300.000.000	-	-	-	1 unit	300.000.000			
					7	01	02	2.07	10	5. Pengadaa Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	2 Unit	20.000.000	-	-	1 Unit	5.000.000	3 Unit	25.000.000		
					7	01	02	2.08		6. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemangaj Uresan Pemerintah Daerah	Keluaran	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	-	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan		108 Laporan				
										Hasil	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100%	220.500.000	100%	230.500.000	100%	235.500.000	100%	686.500.000			
					7	01	02	2.08	01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	36 Laporan	1.500.000	Kecamata a Sijuk	Sijuk
					7	01	02	2.08	02	2. Penyediaan Jasa Komenikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komenikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	35.000.000	36 Laporan	105.000.000		
					7	01	02	2.08	04	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	12 Laporan	185.000.000	12 Laporan	195.000.000	12 Laporan	200.000.000	36 Laporan	580.000.000		
					7	01	02	2.09		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangaj Uresan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-	59 Unit		62 Unit	64 Unit		185 Unit				
										Hasil	kelancaran operasional kantor	-	100%	195.000.000	100%	540.000.000	100%	310.000.000	100%	1.045.000.000			
					7	01	02	2.09	01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	10 Unit	50.000.000	13 Unit	60.000.000	14 Unit	70.000.000	39 Unit	180.000.000	Kecamata a Sijuk	Sijuk
					7	01	02	2.09	02	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000	3 unit	50.000.000	9 Unit	150.000.000		

					7	01	02	2.03	06	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	45 Unit	35.000.000	45 Unit	30.000.000	45 Unit	30.000.000	225 Unit	95.000.000		
					7	01	02	2.03	09	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	1 Unit	60.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	60.000.000	5 Unit	520.000.000		
					7	01	02	2.03	10	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	-	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000			
					7	01	03			2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	85%	302.325.000	90%	302.325.000	90%	302.325.000	90%	306.975.000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
					7	01	03	2.01		1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran	1. Dokumen hasil Musrenbang	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	87.650.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	87.650.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	87.650.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	262.950.000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
										2. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan									
										Hasil	-	85%	90%	90%									
					7	01	03	2.01	01	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000	21 Lembaga Kemasyarakatan	52.500.000		
					7	01	03	2.01	03	2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	1 Laporan	70.150.000	1 Laporan	70.150.000	1 Laporan	70.150.000	3 Laporan	210.450.000		
					7	01	03	2.03		2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluaran	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	-	6 Pemberdayaan	214.675.000	6 Pemberdayaan	214.675.000	6 Pemberdayaan	214.675.000	18 Pemberdayaan	644.025.000		
										Hasil	-	85%	90%	90%									
					7	01	03	2.03	01	1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	-	3 lembaga kemasyarakatan	26.775.000	3 lembaga kemasyarakatan	26.775.000	3 lembaga kemasyarakatan	26.775.000	3 lembaga kemasyarakatan	80.325.000		
					7	01	03	2.03	04	2. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	2 Laporan	168.200.000	2 Laporan	168.200.000	2 Laporan	168.200.000	6 Laporan	504.600.000		
					7	01	03	2.03	05	3. Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	1 Laporan	19.700.000	1 Laporan	19.700.000	1 Laporan	19.700.000	3 Laporan	59.100.000		
					7	01	05			3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100%	741.850.000	100%	741.850.000	100%	741.850.000	100%	2.225.550.000		
					7	01	05	2.01		1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Keluaran	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	-	2750 Orang	741.850.000	2750 Orang	741.850.000	2750 Orang	741.850.000	8250 Orang	2.225.550.000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
										Hasil	-	100%	100%	100%									
					7	01	05	2.01	03	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	2250 Orang	393.200.000	2250 Orang	393.200.000	2250 Orang	393.200.000	6750 Orang	1.179.600.000		

				7	01	05	2.01	04	2. Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Keluaran	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	500 Orang	348.650.000	500 Orang	348.650.000	500 Orang	348.650.000	1500 Orang	1.045.350.000		
			Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Desa	7	01	06			4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Desa Taat Administrasi												
				7	01	06	2.01		1. Kegiatan	Keluaran	Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1 Dok		1 Dok		1 Dok		3 Dok			
									Hasil		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggara dengan baik	-	100%	33.050.000	100%	117.150.000	100%	117.150.000	100%	327.350.000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
				7	01	06	2.01	02	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	1 Dok	27.050.000	1 Dok	27.050.000	1 Dok	27.050.000	3 Dok	81.150.000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
				7	01	06	2.01	03	2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	3 Dok	75.000.000		
				7	01	06	2.01	06	3. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	1 Dok	24.100.000	1 Dok	24.100.000	2 Dok	48.200.000		
				7	01	06	2.01	07	4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	1 Dok	3.500.000	1 Dok	3.500.000	1 Dok	3.500.000	3 Dok	10.500.000		
				7	01	06	2.01	09	5. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	2 Dok	37.500.000	3 Dok	37.500.000	3 Dok	37.500.000	8 Dok	112.500.000		
									Catatan													
														5.636.725.000		6.290.025.000		5.820.825.000		17.747.575.000		



Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Belitung dengan Dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Belitung, Kecamatan Badau berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Badau menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Dari beberapa sasaran yang telah disusun, terdapat beberapa indikator sasaran yang secara eksplisit mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 yang tertuang pada tabel 7.1 berikut ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan**  
**Sasaran RPD**

NO.	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Kinerja pada awal Periode Restra	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	2024	2025	2026	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,50	3.50	3.55	3.60	3,60
	Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa	80 %	85%	90%	90%	90 %
	Persentase Desa beradministrasi baik sesuai ketentuan yang berlaku.	80 %	100%	100%	100%	100 %

Rencana Strategis Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Sijuk telah sesuai dengan **Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan untuk memastikan pencapaian kinerja strategis Kecamatan Sijuk, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan arahan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan selanjutnya sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan perangkat daerah.

Jika di kemudian hari terdapat penyesuaian kebijakan pembangunan yang berdampak terhadap rencana strategis perangkat daerah maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungpandan, April 2023

**CAMAT SIJUK,**

**FEBRIANSYAH, S.STP**  
**NIP. 198702132006021001**



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan  
TAHUN 2024-2026

Tujuan		Sasaran		Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp				
(1)		(2)		(4)		(5)		(6)		(7)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1.1.	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan	1.1.1.	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dalam pemenuhan standar						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			3.50%		3.55%		3.60%		3.60%		Kecamatan Sijuk	Sijuk		
			Meningkatnya tata kelola pelayanan publik Kecamatan	7	01	01		1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.	1. Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan. 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah 4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	100%	4,499,500,000	100%	100%	5,128,700,000	100%	4,659,500,000	100%	76%	100%	14,287,700,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
									-	76%	76%												
									-	100%	100%												
									-	100%	100%												
				7	01	01	2.01	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran Dokumen Hasil perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	11 Dok	12,000,000	11 Dok	12,000,000	11 Dok	12,000,000	33 Dok	100%	36,000,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk		
								Hasil Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai Peraturan	-	100%	100%												
				7	01	01	2.01	01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3 Dok	3,000,000	3 Dok	3,000,000	3 Dok	3,000,000				9 Dok	9,000,000
				7	01	01	2.01	02	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dok	1,500,000	1 Dok	1,500,000	1 Dok	1,500,000				3 Dok	4,500,000
				7	01	01	2.01	03	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dok	1,500,000	1 Dok	1,500,000	1 Dok	1,500,000				3 Dok	4,500,000
				7	01	01	2.01	04	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 Dok	1,500,000	1 Dok	1,500,000	1 Dok	1,500,000				3 Dok	4,500,000
				7	01	01	2.01	05	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 Dok	1,500,000	1 Dok	1,500,000	1 Dok	1,500,000				3Dok	4,500,000
				7	01	01	2.01	07	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,000,000				9 Laporan	9,000,000

Tujuan		Sasaran		Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp				
(1)		(2)		(4)				(5)	(6)		(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				7	01	01	2.02		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen keuangan Perangkat Daerah	-	4 Dok	3,004,500,000	4 Dok	3,204,500,000	4 Dok	3,304,500,000	12 Dok	9,513,500,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
								Hasil	Terpenuhinya Dokumen Keuangan sesuai Peraturan	-	100%	100%	100%		100%							
				7	01	01	2.02	01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	21 Orang / Bulan	3,000,000,000	21 Orang / Bulan	3,200,000,000	21 Orang / Bulan	3,300,000,000	63 Orang/ bulan	9,500,000,000		
						7	01	01	2.02	05	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 laporan	1,500,000	1 laporan	1,500,000	1 laporan	1,500,000	3 laporan	4,500,000
						7	01	02	2.02	08	3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,000,000	6 Dok	9,000,000
				7	01	02	2.05		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	Terpenuhinya Administrasi Pegawai	-	31 Orang	109,500,000	31 Orang	109,500,000	31 Orang	109,500,000	93 Orang	328,500,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
								Hasil	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%		100%							
				7	01	02	2.05	02	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	19,500,000	1 Paket	19,500,000	1 Paket	19,500,000	105 Stel	58,500,000		
						7	01	02	2.05	09	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	6 Orang	90,000,000	6 Orang	90,000,000	6 Orang	90,000,000	18 Orang	270,000,000
				7	01	02	2.06		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah.	-	20 Paket	379,000,000	20 Paket	347,500,000	20 Paket	351,000,000	60 Paket	1,077,500,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
								Hasil	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%		100%							
				7	01	02	2.06	01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	1 Paket	20,000,000	1 Paket	17,500,000	1 Paket	20,000,000	3 Paket	57,500,000		
						7	01	02	2.06	02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	2 Paket	60,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	6 Paket	160,000,000
						7	01	02	2.06	03	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	1 Paket	8,000,000	1 Paket	9,000,000	1 Paket	10,000,000	3 Paket	27,000,000
						7	01	02	2.06	04	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	2 Paket	140,000,000	2 Paket	120,000,000	2 Paket	120,000,000	6 Paket	380,000,000
						7	01	02	2.06	05	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	-	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	3 Paket	60,000,000
						7	01	02	2.06	06	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	-	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,000,000	1 Dok	6,000,000	3 Dok	18,000,000
						7	01	02	2.06	09	7. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	-	12 Laporan	125,000,000	12 Laporan	125,000,000	12 Laporan	125,000,000	36 Laporan	375,000,000
				7	01	02	2.07		5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran	Jenis Barang Milik Daerah	-	45 Unit	579,000,000	60 Unit	684,700,000	10 Unit	337,000,000	115 Unit	1,600,700,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
								Hasil	Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Aparatur	-	100%	100%	100%		100%							
				7	01	02	2.07	02	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang disediakan	-	3 Unit	150,000,000	1 Unit	600,000,000	3 Unit	150,000,000	7 unit	900,000,000		
						7	01	02	2.07	05	2. Pengadaan Mebel	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	32 Unit	73,000,000	50 Unit	30,000,000	2 Unit	20,000,000	84 unit	123,000,000
						7	01	02	2.07	06	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	7 Unit	36,000,000	9 Unit	54,700,000	4 Unit	162,000,000	20 Unit	252,700,000
						7	01	02	2.07	09	4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	1 Unit	300,000,000	-	-	-	-	1 unit	300,000,000
						7	01	02	2.07	10	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	2 Unit	20,000,000	-	-	1 Unit	5,000,000	3 Unit	25,000,000

Tujuan		Sasaran		Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)				
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp			
(1)		(2)		(4)				(5)		(6)		(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				7	01	02	2.08		6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	-	36 Laporan	220,500,000	36 Laporan	230,500,000	36 Laporan	235,500,000	108 Laporan	686,500,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
								Hasil	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%		100%							
				7	01	02	2.08	01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan	500,000	12 Laporan	500,000	12 Laporan	500,000	36 Laporan	1,500,000		
				7	01	02	2.08	02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	36 Laporan	105,000,000		
				7	01	02	2.08	04	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	12 Laporan	185,000,000	12 Laporan	195,000,000	12 Laporan	200,000,000	36 Laporan	580,000,000		
				7	01	02	2.09		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-	59 Unit	195,000,000	62 Unit	540,000,000	64 Unit	310,000,000	185 Unit	1,045,000,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
								Hasil	kelancaran operasional kantor	-	100%	100%	100%									
				7	01	02	2.09	01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	10 Unit	50,000,000	13 Unit	60,000,000	14 Unit	70,000,000	39 Unit	180,000,000		
				7	01	02	2.09	02	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3 unit	50,000,000	3 unit	50,000,000	3 unit	50,000,000	9 Unit	150,000,000		
				7	01	02	2.09	06	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	45 Unit	35,000,000	45 Unit	30,000,000	45 Unit	30,000,000	225 Unit	95,000,000		
				7	01	02	2.09	09	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	1 Unit	60,000,000	1 Unit	400,000,000	1 Unit	60,000,000	5 Unit	520,000,000		
				7	01	02	2.09	10	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000		
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	01	03			2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		-	85%	302,325,000	90%	302,325,000	90%	302,325,000	90%	906,975,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
				7	01	03	2.01		1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran	Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	2 Dokumen	87,650,000	2 Dokumen	87,650,000	2 Dokumen	87,650,000	6 Dokumen	262,950,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
								Hasil	Pemberdayaan Desa Terkoordinasi Dengan Baik	-	85%	90%	90%									
				7	01	03	2.01	01	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	17,500,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	17,500,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	17,500,000	21 Lembaga Kemasyarakatan	52,500,000		
				7	01	03	2.01	03	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	1 laporan	70,150,000	1 laporan	70,150,000	1 laporan	70,150,000	3 laporan	210,450,000		

Tujuan		Sasaran		Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
												2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)				
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp			
(1)		(2)		(4)		(5)		(6)		(7)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				7	01	03	2.03		Keluaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	6 Pemberdayaan	214,675,000	6 Pemberdayaan	214,675,000	6 Pemberdayaan	214,675,000	18 Pemberdayaan	644,025,000			
								Hasil		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan terselenggara dengan Baik	-	85%		90%		90%		90%				
				7	01	03	2.03	01	1. Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Keluaran	Jumlah Lembaga Masyarakat yang diselenggarakan	-	3 lembaga masyarakat	26,775,000	3 lembaga masyarakat	26,775,000	3 lembaga masyarakat	26,775,000	9 lembaga masyarakat	80,325,000		
				7	01	03	2.03	04	2. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	2 laporan	168,200,000	2 laporan	168,200,000	2 laporan	168,200,000	6 laporan	504,600,000		
				7	01	03	2.03	05	3. Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	1 laporan	19,700,000	1 laporan	19,700,000	1 laporan	19,700,000	3 laporan	59,100,000		
				7	01	05			3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		-	100%	741,850,000	100%	741,850,000	100%	741,850,000	100%	2,225,550,000		
				7	01	05	2.01		1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keluaran	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	1 Dok	741,850,000	1 Dok	741,850,000	1 Dok	741,850,000	3 Dok	2,225,550,000		
								Hasil		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100%	100%		100%		100%					
				7	01	05	2.01	03	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	2250 Orang	393,200,000	2250 Orang	393,200,000	2250 Orang	393,200,000	6750 Orang	1,179,600,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
				7	01	05	2.01	04	2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional	Keluaran	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	500 Orang	348,650,000	500 Orang	348,650,000	500 Orang	348,650,000	1500 Orang	1,045,950,000		
				7	01	06			4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Administrasi		-	100%	93,050,000	100%	117,150,000	100%	117,150,000	100%	327,350,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
				7	01	06	2.01		1. Kegiatan Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran	Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1 Dok	93,050,000	1 Dok	117,150,000	1 Dok	117,150,000	3 Dok	327,350,000		
								Hasil		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggara dengan baik	-	100%	100%		100%		100%					
				7	01	06	2.01	02	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	1 Dok	27,050,000	1 Dok	27,050,000	1 Dok	27,050,000	3 Dok	81,150,000	Kecamatan Sijuk	Sijuk
				7	01	06	2.01	03	2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	1 Dok	25,000,000	1 Dok	25,000,000	1 Dok	25,000,000	3 Dok	75,000,000		
				7	01	06	2.01	06	3. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	1 Dok	24,100,000	1 Dok	24,100,000	2 Dok	48,200,000		
				7	01	06	2.01	07	4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	1 Dok	3,500,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	3,500,000	3 Dok	10,500,000		
				7	01	06	2.01	09	5. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	2 Dok	37,500,000	3 Dok	37,500,000	3 Dok	37,500,000	8 Dok	112,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2021	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

5,636,725,000	6,290,025,000	5,820,825,000	17,747,575,000
---------------	---------------	---------------	----------------

CASCADINNG KINERJA KECAMATAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 - 2026

OPD   ESELON II	Sasaran RPMD	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel																					
	Tujuan	Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Kecamatan Sijuk Indikator Tujuan 1 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Formulasi : IKM = (Total dari nilai per unsur / total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang																					
	Sasaran Strategis	Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Indikator Sasaran 1 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Formulasi : IKM = (Total dari nilai per unsur / total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang																					
BIDANG   ESELON III	Program	Program 1 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Terlaksananya Fasilitas dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indikator Program : 1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan 100% 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 76% 3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100% 4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % Formulasi : Persentase Kualitas Pelayanan Perkantoran						Program 2 : Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sasaran Program : Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat desa Indikator Program : Persentase pemberdayaan masyarakat desa Formulasi : Persentase pemberdayaan masyarakat desa			Program 3 : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Sasaran Program : Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Indikator Program : Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Formulasi : Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			Program 4 : Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sasaran Program : Terlaksananya desa taat administrasi Indikator Program : Persentase desa taat administrasi Formulasi : Persentase desa taat administrasi									
SUB KOORDINATOR   ESELON III / IV	Kegiatan   Indikator   Target   Anggaran	<b>Kegiatan 1.1</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>Sasaran Kegiatan</b> Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan <b>Indikator Kegiatan</b> Dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>Hasil</b> Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Peraturan 100 % <b>Target Kegiatan</b> 33 Dokumen <b>Anggaran Kegiatan</b> 31,500,000		<b>Kegiatan 1.2</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <b>Sasaran Kegiatan</b> Terpenuhinya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan <b>Indikator Kegiatan</b> Dokumen Keuangan Perangkat Daerah <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah <b>Hasil</b> Terpenuhinya Dokumen Keuangan Sesuai Peraturan 100 % <b>Target Kegiatan</b> 12 Dokumen <b>Anggaran Kegiatan</b> 9,513,500,000		<b>Kegiatan 1.3</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <b>Sasaran Kegiatan</b> Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <b>Indikator Kegiatan</b> Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <b>Hasil</b> Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 76% <b>Target Kegiatan</b> 93 Orang <b>Anggaran Kegiatan</b> 328,500,000		<b>Kegiatan 1.4</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah <b>Sasaran Kegiatan</b> Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah <b>Indikator Kegiatan</b> Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah <b>Hasil</b> Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100% <b>Target Kegiatan</b> 60 Paket <b>Anggaran Kegiatan</b> 1,077,500,000		<b>Kegiatan 1.5</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <b>Sasaran Kegiatan</b> Tersedianya jenis barang milik daerah <b>Indikator Kegiatan</b> Jenis barang milik daerah <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah Jenis barang milik daerah <b>Hasil</b> Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100% <b>Target Kegiatan</b> 115 Unit <b>Anggaran Kegiatan</b> 1,600,700,000		<b>Kegiatan 1.6</b> Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah <b>Sasaran Kegiatan</b> Tersedianya Barang milik daerah dalam kondisi baik <b>Indikator Kegiatan</b> Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran <b>Hasil</b> Persentase pemenuhan administrasi perkantoran perangkat daerah 100% <b>Target Kegiatan</b> 108 Laporan <b>Anggaran Kegiatan</b> 686,500,000		<b>Kegiatan 1.7</b> Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah <b>Sasaran Kegiatan</b> Barang milik daerah dalam kondisi baik <b>Indikator Kegiatan</b> Barang milik daerah dalam kondisi baik <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik <b>Hasil</b> Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 100% <b>Target Kegiatan</b> 185 Unit <b>Anggaran Kegiatan</b> 1,045,000,000		<b>Kegiatan 2.1</b> Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa <b>Sasaran Kegiatan</b> Terselenggaranya dokumen hasil musrenbang dan laporan hasil kegiatan pemberdayaan desa <b>Indikator Kegiatan</b> Dokumen hasil musrenbang dan laporan hasil kegiatan pemberdayaan desa <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah dokumen hasil musrenbang dan laporan hasil kegiatan pemberdayaan desa <b>Hasil</b> Pemberdayaan Desa Terkoordinasi Dengan Baik 90% <b>Target Kegiatan</b> 6 Dokumen <b>Anggaran Kegiatan</b> 262,950,000		<b>Kegiatan 2.2</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan <b>Sasaran Kegiatan</b> Terselenggaranya Pemberdayaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan <b>Indikator Kegiatan</b> Pemberdayaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan <b>Hasil</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terselenggara dengan Baik 90 % <b>Target Kegiatan</b> 18 Pemberdayaan <b>Anggaran Kegiatan</b> 644,025,000		<b>Kegiatan 3.1</b> Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah <b>Sasaran Kegiatan</b> Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah <b>Indikator Kegiatan</b> Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah <b>Hasil</b> Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah 100% <b>Target Kegiatan</b> 3 Dokumen <b>Anggaran Kegiatan</b> 2,225,550,000		<b>Kegiatan 4.1</b> Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa <b>Sasaran Kegiatan</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggara dengan baik <b>Indikator Kegiatan</b> Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <b>Formulasi Kegiatan</b> Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <b>Hasil</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggara dengan baik 100% <b>Target Kegiatan</b> 3 Dokumen <b>Anggaran Kegiatan</b> 327,350,000	
		<b>Sub Kegiatan 1.1.1</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah <b>Target Sub Kegiatan</b> 9 Dokumen <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 4,500,000		<b>Sub Kegiatan 1.2.1</b> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Tersedianya gaji dan tunjangan ASN <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Gaji dan Tunjangan ASN <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Jumlah gaji dan tunjangan ASN <b>Target Sub Kegiatan</b> 630rang/Bulan <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 9,500,000,000		<b>Sub Kegiatan 1.3.1</b> Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan <b>Target Sub Kegiatan</b> 105 stel <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 58,500,000		<b>Sub Kegiatan 1.4.1</b> Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor <b>Target Sub Kegiatan</b> 3 Paket <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 57,500,000		<b>Sub Kegiatan 1.5.1</b> Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang disediakan <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Presentase Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang disediakan <b>Target Sub Kegiatan</b> 7 Unit <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 900,000,000		<b>Sub Kegiatan 1.6.1</b> Penyediaan jasa surat menyurat <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terpenuhinya Penyediaan jasa Surat Menyurat <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat <b>Target Sub Kegiatan</b> 36 Laporan <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 1,500,000		<b>Sub Kegiatan 1.7.1</b> Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terpenuhinya Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Perizinannya <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Perizinannya <b>Target Sub Kegiatan</b> 39 Unit <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 180,000,000		<b>Sub Kegiatan 2.1.1</b> Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa <b>Target Sub Kegiatan</b> 21 Lembaga Kemasyarakatan <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 52,500,000		<b>Sub Kegiatan 2.2.1</b> Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan <b>Target Sub Kegiatan</b> 9 Lembaga Kemasyarakatan <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 80,325,000		<b>Sub Kegiatan 3.1.1</b> Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terpenuhinya Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa <b>Target Sub Kegiatan</b> 6750 Orang <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 1,179,600,000		<b>Sub Kegiatan 4.1.1</b> Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa <b>Sasaran Sub Kegiatan</b> Terpenuhinya Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa <b>Indikator Sub Kegiatan</b> Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa <b>Formulasi Sub Kegiatan</b> Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa <b>Target Sub Kegiatan</b> 3 Dokumen <b>Anggaran Sub Kegiatan</b> 61,150,000	
		<b>Sub Kegiatan 1.1.2</b> Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>		<b>Sub Kegiatan 1.2.2</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>		<b>Sub Kegiatan 1.3.2</b> Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>		<b>Sub Kegiatan 1.4.2</b> Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>		<b>Sub Kegiatan 1.5.2</b> Pengadaan mebel <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>		<b>Sub Kegiatan 1.6.2</b> Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>		<b>Sub Kegiatan 1.7.2</b> Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>		<b>Sub Kegiatan 2.1.2</b> Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>		<b>Sub Kegiatan 2.2.2</b> Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>		<b>Sub Kegiatan 3.1.2</b> Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>		<b>Sub Kegiatan 4.1.2</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa <b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Dokumen
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
4,500,000
<b>Sub Kegiatan 1.1.3</b>
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Dokumen
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
4,500,000
<b>Sub Kegiatan 1.1.4</b>
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Dokumen
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
4,500,000
<b>Sub Kegiatan 1.1.5</b>
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Dokumen

Terpenubinya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Laporan
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
4,500,000
<b>Sub Kegiatan 1.2.3</b>
Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Terpenubinya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>Target Sub Kegiatan</b>
6 Dokumen
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
9,000,000

Terpenubinya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>Target Sub Kegiatan</b>
18 Orang
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
270,000,000

Terpenubinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>Target Sub Kegiatan</b>
6 Paket
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
160,000,000
<b>Sub Kegiatan 1.4.3</b>
Penyediaan peralatan rumah tangga
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Tersedianya peralatan rumah tangga
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Peralatan Rumah Tangga
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Peralatan Rumah Tangga
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Paket
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
27,000,000
<b>Sub Kegiatan 1.4.4</b>
Penyediaan bahan logistik kantor
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Bahan Logistik Kantor
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Bahan Logistik Kantor
<b>Target Sub Kegiatan</b>
6 Paket
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
380,000,000
<b>Sub Kegiatan 1.4.5</b>
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Barang Cetakan dan Pengadaan
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Paket

Tersedianya paket mebel
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Jumlah paket mebel yang disediakan
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Persentase Jumlah paket mebel yang disediakan
<b>Target Sub Kegiatan</b>
84 Unit
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
123,000,000
<b>Sub Kegiatan 1.5.3</b>
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>Target Sub Kegiatan</b>
20 Unit
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
252,700,000
<b>Sub Kegiatan 1.5.4</b>
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
<b>Target Sub Kegiatan</b>
1 Unit
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
300,000,000
<b>Sub Kegiatan 1.5.5</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Unit

Terpenubinya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<b>Target Sub Kegiatan</b>
36 Laporan
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
105,000,000
<b>Sub Kegiatan 1.6.3</b>
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
<b>Target Sub Kegiatan</b>
36 Laporan
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
580,000,000

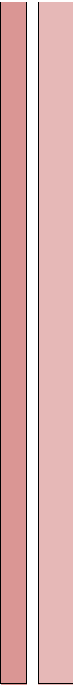
Terpenubinya Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
<b>Target Sub Kegiatan</b>
9 Unit
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
150,000,000
<b>Sub Kegiatan 1.7.3</b>
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Terpenubinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
<b>Target Sub Kegiatan</b>
225 Unit
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
95,000,000
<b>Sub Kegiatan 1.7.4</b>
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
<b>Target Sub Kegiatan</b>
5 Unit
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
520,000,000
<b>Sub Kegiatan 1.7.5</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
<b>Target Sub Kegiatan</b>
1 Unit

Terpenubinya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Laporan
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
210,450,000

Terpenubinya Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
<b>Target Sub Kegiatan</b>
6 Laporan
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
504,600,000
<b>Sub Kegiatan 2.2.3</b>
Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Terpenubinya Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Laporan
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
59,100,000

Terpenubinya orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
<b>Target Sub Kegiatan</b>
1500 Orang
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
1,045,950,000

Terpenubinya Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Dokumen
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
75,000,000
<b>Sub Kegiatan 4.1.3</b>
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Terpenubinya Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
<b>Target Sub Kegiatan</b>
2 Dokumen
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
48,200,000
<b>Sub Kegiatan 4.1.4</b>
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Terpenubinya Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
<b>Target Sub Kegiatan</b>
3 Dokumen
<b>Anggaran Sub Kegiatan</b>
10,500,000
<b>Sub Kegiatan 4.1.5</b>
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>
Terpenubinya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
<b>Formulasi Sub Kegiatan</b>
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
<b>Target Sub Kegiatan</b>
8 Dokumen



Anggaran Sub Kegiatan
4,500,000
Sub Kegiatan 1.1.6
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Sub Kegiatan
Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan
Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Formulasi Sub Kegiatan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Sub Kegiatan
9 Laporan
Anggaran Sub Kegiatan
9,000,000

Anggaran Sub Kegiatan
60,000,000
Sub Kegiatan 1.4.6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sasaran Sub Kegiatan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Sub Kegiatan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Formulasi Sub Kegiatan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Target Sub Kegiatan
3 Dokumen
Anggaran Sub Kegiatan
18,000,000

Sub Kegiatan 1.4.7
Penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Sasaran Sub Kegiatan
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Sub Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD
Formulasi Sub Kegiatan
Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD
Target Sub Kegiatan
36 Laporan
Anggaran Sub Kegiatan
375,000,000

Anggaran Sub Kegiatan
25,000,000

Anggaran Sub Kegiatan
100,000,000

Anggaran Sub Kegiatan
112,500,000

sujuk, Oktober 2022  
  
camat sijuk

FEBRIANSYAH, SSTP  
Pembina  
NIP. 198702132006021001



